



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3506233, FAKSIMILE (021) 3506233; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-22A/PK.1/2018

Jakarta, 1 Maret 2018

Sifat : Sangat Segera

Hal : Permintaan Data Pendukung Reviu Belanja APBD

Yth. Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
di tempat

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), kami sedang melakukan reviu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, kami memerlukan data pendukung sebagai berikut:

1. Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah mengenai Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, beserta lampiran (yang berlaku saat ini).
2. Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah mengenai Standar Biaya/Standar Harga Satuan/Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja, beserta lampiran (yang berlaku saat ini).

Sehubungan dengan itu, mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan data pendukung dimaksud kepada kami paling lambat hari **Rabu tanggal 7 Maret 2018** melalui:

1. Surat elektronik (email) pada alamat akpddaper@gmail.com, sekredaper@gmail.com, atau akpdpndp12@gmail.com;
2. Faksimili Direktorat Dana Perimbangan nomor (021) 3506218 atau (021) 3511505; dan/atau
3. Surat pos tercatat ke alamat:

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Dana Perimbangan,
Gedung Radius Prawiro Lt 7, Jalan Dr. Wahidin No 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710

Apabila terdapat hal yang perlu dikonfirmasi, dapat menghubungi Saudara Ari Gemini (HP 081296551433/0811961076) atau Saudara Bambang Imam Pamudji (HP 089655700001) atau Saudara Bondan Widyatmoko (HP 081319798314).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Rukijo

NIP 19670210 199310 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia